

Dari Kemitraan ke Sejahteraan: Menatap Masa Depan Ekonomi Inklusif

Olivia Junianti br Sianturi*, Amanda Balqis Batubara, Tetra Marid Butar Butar, Jihan Humairoh

Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma, Medan, Indonesia

Email: ¹*junnsianturi19@gmail.com, ²amandabalqis792@gmail.com, ³tetrabutarbutar233@gmail.com,

⁴jihanhumairoh07@gmail.com

(* : corresponding author)

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang pesat belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang masih menghadapi kesenjangan literasi digital, akses pembiayaan, dan posisi tawar terhadap mitra platform besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola kemitraan dalam ekosistem ekonomi digital, mengevaluasi kontribusinya terhadap kesejahteraan yang inklusif, mengungkap tantangan yang menghambat pemerataan manfaat, serta merumuskan proyeksi arah kemitraan ke depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus, melalui penelusuran dokumen kebijakan, laporan lembaga terkait, dan wawancara dengan pemangku kepentingan sebagai sumber data utama. Hasil kajian awal menunjukkan bahwa kemitraan lintas sektor antara pemerintah, platform digital, lembaga keuangan, dan pelaku usaha berpotensi menjadi jembatan strategis menuju ekonomi inklusif, namun keberhasilannya sangat bergantung pada desain kemitraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis bagi kajian ekonomi digital-inklusif serta masukan praktis bagi perumusan kebijakan kemitraan yang lebih merata.

Kata Kunci: Ekonomi Digital, Platform, Ekonomi Inklusif, UMKM, Kesejahteraan

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah wajah perekonomian Indonesia secara fundamental. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan kontribusi ekonomi digital nasional menembus Rp155,57 triliun pada tahun 2026, sebuah lompatan yang mencerminkan besarnya harapan terhadap teknologi sebagai motor pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif [2]. *E-commerce* Indonesia sendiri diproyeksikan tumbuh pesat seiring bertransisinya dekade digital menuju realitas kecerdasan buatan (*AI reality*) [3]. Perkembangan ini menunjukkan bahwa adopsi platform digital dan integrasi sistem pembayaran elektronik kini menjadi pilar utama dalam mengakselerasi aktivitas perekonomian nasional [2], [5].

Di balik angka-angka makro yang menjanjikan tersebut, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional karena daya serap tenaga kerjanya yang besar dan perannya sebagai penggerak aktivitas ekonomi di berbagai daerah [6], [7]. Namun, tingkat adopsi digital serta penerimaan manfaat di kalangan UMKM masih menyisakan tantangan berupa ketimpangan posisi tawar dan belum meratanya distribusi manfaat ekonomi [4]. Sebagian besar usaha mikro masih menghadapi keterbatasan modal operasional serta margin laba yang tipis. Kesenjangan ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi digital tidak serta-merta berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan bagi pelaku usaha di lapisan bawah piramida ekonomi.

Di sinilah kemitraan menjadi kata kunci. Platform digital, *marketplace*, perusahaan rintisan teknologi, lembaga keuangan, hingga pemerintah semakin dituntut membangun skema kolaborasi yang tidak sekadar menghubungkan UMKM dengan pasar, tetapi juga memberi ruang bagi pelaku usaha kecil untuk naik kelas melalui akses pembiayaan, pendampingan, standarisasi mutu, hingga integrasi rantai pasok. Sebagai ilustrasi, Kementerian UMKM [6] mengembangkan skema Holding UMKM 2026 yang menempatkan usaha menengah sebagai poros penghubung bagi pelaku usaha mikro dalam satu kluster produksi, sementara kolaborasi lintas negara seperti kemitraan dengan US-ASEAN Business Council membuka akses pasar global bagi UMKM [8]. Fenomena tersebut menandai pergeseran paradigma, dari sekadar "partisipasi dalam ekonomi digital" menuju "kemitraan strategis" sebagai jalan menuju kesejahteraan yang lebih inklusif.

Kajian terdahulu mengenai peran ekonomi digital terhadap UMKM sejauh ini lebih banyak memotret dampak adopsi teknologi terhadap efisiensi operasional dan perluasan pasar [4], maupun proyeksi makro pertumbuhan ekonomi digital nasional. Kajian-kajian tersebut umumnya berhenti pada level deskripsi dampak, dan belum banyak mengulas secara mendalam bagaimana pola relasi kemitraan antara UMKM, platform digital, lembaga keuangan, dan pemerintah dirancang serta dijalankan agar manfaatnya terdistribusi secara adil sesuai kerangka pengukuran ekonomi inklusif [10]. Di sinilah letak kesenjangan (*research gap*) yang coba diisi oleh penelitian ini: mengalihkan fokus dari sekadar "dampak ekonomi digital" menjadi "arsitektur dan kualitas kemitraan" sebagai jembatan menuju kesejahteraan inklusif.

Meski inisiatif kemitraan terus bertambah, praktiknya di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan, seperti keterbatasan literasi digital dan belum optimalnya pengawasan kemitraan yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi [9], [11]. Pertanyaannya kemudian bukan lagi sekadar apakah kemitraan ekonomi digital itu ada, melainkan bagaimana pola kemitraan tersebut dapat dirancang, dijalankan, dan diarahkan agar

ISSN 2962-7966 (media online)

Vol 4 No 1, Hal: 293-298

benar-benar bermuara pada kesejahteraan yang inklusif [1], [10]. Kondisi inilah yang melatarbelakangi urgensi penelitian ini, sebagai upaya menatap masa depan ekonomi inklusif melalui evaluasi dan proyeksi arah kemitraan dalam ekonomi digital di Indonesia [12].

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pola dan bentuk kemitraan terjalin dalam ekosistem ekonomi digital atau platform di Indonesia saat ini. Selain itu, penelitian ini berupaya menganalisis sejauh mana kemitraan tersebut berkontribusi terhadap terciptanya kesejahteraan ekonomi yang inklusif, khususnya bagi pelaku UMKM. Di samping memetakan kontribusinya, kajian ini juga mengeksplorasi berbagai tantangan dan faktor penghambat yang menyebabkan manfaat kemitraan ekonomi digital belum terdistribusi secara merata. Pada akhirnya, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan arah dan strategi kemitraan ekonomi digital ke depan agar mampu mendorong terwujudnya ekonomi inklusif yang berkelanjutan.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola kemitraan yang berkembang dalam ekosistem ekonomi digital atau platform di Indonesia saat ini. Lebih lanjut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kontribusi kemitraan tersebut terhadap pemerataan kesejahteraan ekonomi, terutama bagi para pelaku UMKM. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap berbagai tantangan struktural maupun operasional yang menjadi penghambat utama dalam pemerataan manfaat kemitraan ekonomi digital. Sebagai *output* akhir, penelitian ini menargetkan perumusan proyeksi serta rekomendasi strategi kemitraan di masa mendatang yang berorientasi pada terwujudnya ekonomi inklusif.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai relasi antara kemitraan ekonomi digital dan konsep ekonomi inklusif, khususnya dalam konteks negara berkembang dengan populasi UMKM yang besar seperti Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan pemerintah, platform digital, lembaga keuangan, maupun pelaku usaha dalam merancang skema kemitraan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga pertumbuhan ekonomi digital dapat berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ekonomi Digital dan Platform

Ekonomi digital merujuk pada seluruh aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital, internet, dan platform daring dalam proses produksi, distribusi, transaksi, maupun konsumsi. Laporan tahunan *e-Conomy SEA* yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company mencatat bahwa ekonomi digital Asia Tenggara tumbuh dari sekitar USD 40 miliar pada 2016 menjadi lebih dari USD 300 miliar *Gross Merchandise Value* (GMV) pada 2025, dengan Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar di kawasan [3]. Platform digital yang mencakup *marketplace*, aplikasi pembayaran, dan media sosial berbasis bisnis menjadi infrastruktur utama yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen secara lebih luas dan efisien.

2.2 Konsep Kemitraan Usaha

Secara yuridis, konsep kemitraan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah [11]. Pasal 1 ayat (13) undang-undang tersebut mendefinisikan kemitraan sebagai kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar [11]. Pasal 11 undang-undang ini menegaskan bahwa aspek kemitraan ditujukan antara lain untuk mendorong hubungan yang saling menguntungkan antar-pelaku usaha serta meningkatkan posisi tawar UMKM [11]. Prinsip kesetaraan dan kedudukan hukum yang seimbang antarpihak menjadi syarat penting agar kemitraan tidak menciptakan ketergantungan usaha kecil terhadap mitra yang lebih besar, sebagaimana ditegaskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) [9]. Dalam konteks ekonomi digital, konsep kemitraan ini diperluas mencakup relasi antara UMKM dengan platform teknologi, lembaga keuangan digital, maupun mitra lintas negara.

2.3 Ekonomi Inklusif

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan pembangunan ekonomi inklusif sebagai pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antarkelompok dan wilayah [1]. Definisi ini sejalan dengan kerangka kerja global yang memaknai ekonomi inklusif sebagai strategi peningkatan kinerja perekonomian melalui perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui *Inclusive Growth Initiative* juga mengembangkan kerangka pengukuran yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti oleh perbaikan standar hidup secara luas, bukan hanya peningkatan agregat produk domestik bruto [10]. Dengan demikian, ekonomi inklusif tidak diukur semata dari laju pertumbuhan, melainkan dari sejauh mana manfaat

pertumbuhan tersebut dirasakan secara merata oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil [1], [10].

2.4 Penelitian Terdahulu

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dalam laporannya mengenai peran platform digital terhadap pengembangan UMKM menemukan bahwa adopsi platform digital berkontribusi terhadap peningkatan visibilitas usaha, perluasan akses pasar, dan efisiensi operasional pelaku UMKM [4]. Namun, kajian tersebut lebih menyoroti dampak penggunaan platform secara individual oleh pelaku usaha, dan belum banyak mengulas bagaimana desain kemitraan terstruktur antara UMKM, platform, dan pemangku kepentingan lain memengaruhi pemerataan manfaat ekonomi digital [4]. Studi-studi kebijakan serta laporan inisiatif strategis seperti program Holding UMKM dan penguatan ekosistem kemitraan yang dipublikasikan oleh Kementerian UMKM juga masih cenderung bersifat deskriptif-informatif dan belum dianalisis secara akademik dari perspektif kesetaraan kemitraan dan inklusivitas kesejahteraan [6]–[8].

2.5 Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

Berdasarkan kajian terdahulu di atas, penelitian mengenai ekonomi digital dan UMKM di Indonesia masih terfokus pada pengukuran dampak adopsi teknologi terhadap kinerja usaha secara individual. Penelitian yang secara khusus menelaah pola, kualitas, dan arsitektur kemitraan lintas aktor serta bagaimana kemitraan tersebut berkontribusi terhadap kesejahteraan yang inklusif, bukan hanya pertumbuhan agregat masih sangat terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan pendekatan kualitatif yang menempatkan kemitraan sebagai unit analisis utama.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini disusun berdasarkan tiga konsep utama yang saling berkaitan: ekonomi digital/platform sebagai konteks, kemitraan usaha sebagai mekanisme penghubung, dan ekonomi inklusif sebagai tujuan akhir yang hendak dicapai. Pola dan kualitas kemitraan antara UMKM, platform digital, lembaga keuangan, dan pemerintah diposisikan sebagai faktor penentu (mediator) yang menjembatani pertumbuhan ekonomi digital dengan pemerataan kesejahteraan. Kerangka ini digunakan sebagai pedoman dalam menyusun instrumen penelusuran dokumen dan pedoman wawancara, serta dalam menganalisis dan mengategorikan temuan pada tahap hasil dan pembahasan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus (case study). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bersifat eksploratif-deskriptif, yaitu memahami bagaimana pola kemitraan dalam ekosistem ekonomi digital terbentuk, berjalan, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan inklusif bukan untuk mengukur hubungan sebab-akibat antarvariabel secara statistik. Studi kasus digunakan untuk menelaah secara mendalam beberapa inisiatif kemitraan yang berjalan di Indonesia sebagai unit analisis, seperti program Holding UMKM, kemitraan lintas negara melalui US-ASEAN Business Council (USABC), serta perluasan ekosistem pembayaran digital (QRIS).

3.2 Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan terdiri atas:

- Data sekunder, meliputi dokumen kebijakan resmi (Kementerian UMKM, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bank Indonesia), laporan lembaga riset (mis. INDEF), publikasi statistik (BPS, e-Conomy SEA), serta pemberitaan resmi lembaga pemerintah terkait program kemitraan ekonomi digital.
- Data primer (opsional, bila penelitian dilanjutkan ke tahap lapangan), berupa wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci pelaku UMKM yang telah bermitra dengan platform digital, perwakilan platform/marketplace, serta pejabat instansi terkait untuk memperkaya dan memvalidasi temuan dari data sekunder.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

- Studi dokumentasi, yaitu penelusuran dan penelaahan dokumen resmi, siaran pers, laporan tahunan, dan regulasi terkait kemitraan ekonomi digital.
- Observasi non-partisipan, terhadap pelaksanaan program kemitraan yang bersifat publik (mis. lokakarya, pelatihan, forum kemitraan UMKM-platform).

ISSN 2962-7966 (media online)

Vol 4 No 1, Hal: 293-298

- c. Wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci (apabila penelitian mencakup tahap lapangan), menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan empat rumusan masalah penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang terdiri atas tiga tahap:

- a. Reduksi data menyeleksi dan mengelompokkan data yang relevan dengan pola kemitraan, kontribusi terhadap kesejahteraan, dan tantangan yang muncul.
- b. Penyajian data mengorganisasikan data terpilih ke dalam bentuk narasi tematik dan matriks kategori (jenis kemitraan, aktor yang terlibat, manfaat, hambatan).
- c. Penarikan kesimpulan/verifikasi menarik pola dan makna dari data yang telah disajikan, kemudian memverifikasinya melalui triangulasi sumber.

3.5 Keabsahan Data

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga riset independen, dan pemberitaan media, guna memastikan konsistensi temuan sebelum ditarik menjadi kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pola dan Bentuk Kemitraan dalam Ekosistem Ekonomi Digital

Hasil penelusuran dokumen menunjukkan bahwa kemitraan dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia berkembang setidaknya dalam tiga pola utama. Pertama, kemitraan berbasis klusterisasi usaha, sebagaimana tercermin dalam program Holding UMKM 2026 yang diperluas ke berbagai kluster strategis [6]. Pada pola ini, usaha menengah berperan sebagai simpul penghubung yang menaungi banyak usaha mikro dalam satu rantai produksi, sehingga usaha kecil memperoleh kepastian pasar tanpa harus membangun jaringan distribusi sendiri.

Kedua, kemitraan berorientasi peningkatan kapasitas dan akses permodalan melalui pendampingan intensif serta penguatan ekosistem digital untuk perluasan akses pasar [7]. Pola ini menempatkan usaha menengah yang telah naik kelas sebagai "jangkar" penguatan ekosistem bagi jutaan usaha mikro dan kecil di sekitarnya.

Ketiga, kemitraan lintas negara dan lintas platform teknologi global, seperti kolaborasi pendampingan antara UMKM Indonesia dengan anggota US-ASEAN Business Council (USABC) [8]. Pola ini berfokus pada transfer pengetahuan, jejaring bisnis, dan pemanfaatan teknologi untuk mendorong daya saing UMKM ke pasar regional dan global.

Ketiga pola tersebut memperkuat temuan kajian terdahulu bahwa platform digital berkontribusi terhadap peningkatan visibilitas dan daya saing UMKM [4], namun penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi tersebut semakin optimal ketika dibingkai dalam skema kemitraan terstruktur bukan sekadar pemanfaatan platform secara individual oleh masing-masing pelaku usaha.

4.2 Kontribusi Kemitraan terhadap Kesejahteraan Inklusif

Kemitraan-kemitraan di atas berkontribusi terhadap kesejahteraan inklusif melalui setidaknya tiga jalur. Jalur pertama adalah perluasan akses pasar: pelaku UMKM yang sebelumnya hanya menjangkau pasar lokal kini dapat menjual produknya lintas daerah bahkan lintas negara melalui *marketplace* dan media sosial berbasis bisnis [7], [8]. Jalur kedua adalah efisiensi transaksi dan pembiayaan yang didukung oleh perluasan infrastruktur telekomunikasi digital serta penguatan ekosistem pembayaran elektronik nasional [2], [5]. Jalur ketiga adalah peningkatan kapasitas kelembagaan usaha, sebagaimana ditunjukkan oleh skema kemitraan terstruktur yang mendorong UMKM bertransformasi menjadi entitas yang lebih transparan dan kompetitif, sekaligus memperkuat ekosistem usaha mikro di sekitarnya [6], [7].

Meski demikian, manfaat tersebut belum sepenuhnya inklusif. Ketimpangan adopsi teknologi serta belum meratanya jangkauan jaringan digital di berbagai wilayah menjadi tantangan tersendiri [4], [5], sementara program-program kemitraan strategis seperti Holding UMKM dan kolaborasi global US-ASEAN Business Council masih menjangkau jumlah pelaku usaha yang relatif terbatas dibandingkan dengan skala populasi UMKM nasional [6], [8]. Dengan kata lain, kemitraan yang ada telah terbukti berfungsi sebagai jembatan kesejahteraan pada level pelaku usaha yang terlibat langsung, tetapi belum berfungsi merata secara struktural bagi mayoritas UMKM di lapisan bawah piramida usaha.

4.3 Tantangan dan Faktor Penghambat

Penelitian ini mengidentifikasi tiga kategori tantangan utama yang menghambat pemerataan manfaat kemitraan ekonomi digital:

ISSN 2962-7966 (media online)

Vol 4 No 1, Hal: 293-298

- a. Kesenjangan literasi dan kapasitas digital: sebagian besar pelaku usaha mikro, terutama di luar kota besar, belum terbiasa memanfaatkan marketplace, media sosial bisnis, maupun aplikasi pembayaran digital secara maksimal.
- b. Ketimpangan posisi tawar dalam beberapa skema kemitraan: usaha mikro dan kecil masih berada pada posisi yang lebih bergantung kepada mitra usaha menengah atau platform besar, sehingga keberlanjutan manfaat sangat tergantung pada itikad baik mitra yang lebih besar.
- c. Keterbatasan jangkauan program dan infrastruktur: program kemitraan strategis skala nasional pada praktiknya masih terkonsentrasi di kota-kota besar dan wilayah pulau Jawa, sementara persebaran ke daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terpapar) masih terbatas.

Tantangan-tantangan ini sejalan dengan temuan kajian terdahulu yang menyoroti keterbatasan literasi digital dan infrastruktur sebagai hambatan struktural digitalisasi UMKM, namun penelitian ini menambahkan dimensi baru: bahwa hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis (infrastruktur, literasi), tetapi juga bersifat **relasional**, yakni menyangkut desain dan kesetaraan kemitraan itu sendiri.

4.4 Proyeksi dan Arah Kemitraan Ekonomi Digital ke Depan

Berdasarkan pola dan tantangan di atas, kemitraan ekonomi digital ke depan diproyeksikan akan bergerak ke arah tiga hal. Pertama, perluasan skema klusterisasi lintas sektor (mengikuti model Holding UMKM) ke sektor-sektor baru di luar lima klaster strategis yang sudah berjalan, sehingga semakin banyak usaha mikro yang terlindungi dalam satu ekosistem rantai pasok. Kedua, penguatan kemitraan berbasis teknologi mutakhir seperti kecerdasan artifisial untuk pendampingan usaha secara lebih personal dan berskala, sebagaimana disinggung dalam kolaborasi dengan USABC. Ketiga, perluasan jangkauan kemitraan ke wilayah 3T dan daerah non-metropolitan, sebagai prasyarat agar manfaat ekonomi digital benar-benar terdistribusi secara inklusif, bukan hanya terkonsentrasi di kota-kota besar.

Agar arah tersebut dapat tercapai, kemitraan ke depan perlu dirancang dengan prinsip kesetaraan posisi tawar antaraktor, transparansi manfaat, dan pendampingan berkelanjutan bukan sekadar hubungan transaksional jangka pendek antara usaha kecil dan mitra yang lebih besar.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kemitraan dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia berkembang dalam tiga pola utama, yaitu klusterisasi usaha, peningkatan kapasitas dan akses permodalan, serta kemitraan lintas negara dan teknologi global. Kemitraan tersebut secara nyata berkontribusi terhadap kesejahteraan inklusif melalui perluasan akses pasar, efisiensi transaksi dan pembiayaan digital, serta peningkatan kapasitas kelembagaan usaha, meskipun manfaatnya belum menjangkau mayoritas UMKM secara merata. Kondisi ini dipicu oleh sejumlah tantangan utama yang menghambat pemerataan manfaat, seperti kesenjangan literasi digital, ketimpangan posisi tawar antaraktor, serta keterbatasan jangkauan program di luar kota besar dan Pulau Jawa. Oleh karena itu, arah kemitraan ke depan perlu bergerak menuju perluasan klusterisasi lintas sektor, penguatan teknologi pendampingan usaha, dan perluasan jangkauan ke wilayah 3T, dengan mengedepankan prinsip kesetaraan posisi tawar serta keberlanjutan sebagai fondasi utamanya. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kemitraan bukan sekadar pelengkap dari pertumbuhan ekonomi digital, melainkan jembatan struktural yang menentukan apakah pertumbuhan tersebut benar-benar bermuara pada kesejahteraan yang inklusif atau justru terkonsentrasi pada segelintir aktor besar. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi strategis serta catatan metodologis yang perlu dipertimbangkan. Bagi pemerintah, disarankan untuk memperluas skema kemitraan strategis ke lebih banyak sektor dan wilayah, yang disertai insentif bagi mitra usaha menengah maupun platform yang berkomitmen pada kesetaraan posisi tawar dengan pelaku usaha mikro. Sementara itu, bagi platform digital dan pelaku usaha menengah, diperlukan perancangan skema kemitraan yang transparan dalam pembagian manfaat serta penyediaan pendampingan berkelanjutan, alih-alih hanya berfokus pada akses pasar semata. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melengkapi kajian ini dengan data primer melalui wawancara mendalam atau pendekatan kuantitatif berskala besar untuk mengukur dampak kemitraan terhadap indikator kesejahteraan UMKM secara lebih terukur. Penambahan data primer ini penting mengingat penelitian ini masih bersifat kualitatif berbasis penelaahan dokumen dan data sekunder, sehingga temuan yang disajikan bersifat deskriptif-eksploratif dan generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati pada riset-riset mendatang.

REFERENCES

- [1] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), "Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif," 2026. [Daring]. Tersedia: <https://inklusif.bappenas.go.id/>
- [2] Bisnis.com, "Komdigi target kontribusi ekonomi digital Rp155,57 triliun pada 2026, andalkan telko dan GovTech," 14 Jan. 2026. [Daring]. Tersedia: <https://teknologi.bisnis.com/read/20260114/101/1944302/>

ISSN 2962-7966 (media online)

Vol 4 No 1, Hal: 293-298

- [3] Google, Temasek, and Bain & Company, "e-Conomy SEA 2025: From digital decade to AI reality," 2025. [Daring]. Tersedia: <https://www.bain.com/insights/e-conomy-sea-2025/>
- [4] Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), "Peran platform digital terhadap pengembangan UMKM di Indonesia," Laporan Penelitian, 2024. [Daring]. Tersedia: <https://indef.or.id/>
- [5] Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), "Renstra Komdigi 2025–2029: Target kontribusi ekonomi digital nasional," 12 Jan. 2026. [Daring]. Tersedia: <https://ototekno.harianjogja.com/read/2026/01/12/503/1242254/>
- [6] Kementerian UMKM Republik Indonesia, "Kementerian UMKM perkuat kemitraan dan rantai pasok melalui program Holding UMKM 2026," 19 Des. 2025. [Daring]. Tersedia: <https://umkm.go.id/news/gdvh48k7ju2axwjkspk74evw>
- [7] Kementerian UMKM Republik Indonesia, "KemenUMKM perkuat ekosistem digital dan kemitraan untuk perluas akses pasar," 31 Mei 2026. [Daring]. Tersedia: <https://umkm.go.id/news/qhicp9i3m18vgjwq51a3s7va>
- [8] Kementerian UMKM Republik Indonesia, "Kementerian UMKM perluas peluang kemitraan global melalui kolaborasi dengan US-ASEAN Business Council," 5 Juni 2026. [Daring]. Tersedia: <https://umkm.go.id/news/lekfar3xx32aqp9nmi4sa4av>
- [9] Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), "Pengawasan kemitraan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008," 2020. [Daring]. Tersedia: <https://kppu.go.id/pengawasan-kemitraan/>
- [10] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Inclusive growth: The OECD measurement framework*, OECD Statistics Working Papers 2015/06, Paris, Prancis: OECD Publishing, 2015.
- [11] *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Presiden Republik Indonesia, 2008.
- [12] Siaran Berita, "Ekonomi digital Indonesia 2026 dan dampaknya terhadap UMKM lokal," 2 Juni 2026. [Daring]. Tersedia: <https://siaran-berita.com/>